



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/KM.6/2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH
DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK
DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peneruslimpahan kewenangan Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa untuk lebih mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan serta untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ketentuan mengenai peneruslimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
218/KMK.01/2010;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
280/KMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tugas/Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim
Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan
Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana
Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan
Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI
KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.

PERTAMA : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang
telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan
Negara kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan
menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri
Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dikecualikan untuk pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) yang meliputi:

1. pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaan
Pengelola Barang, yang terdiri atas:
 - a. BMN yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga (*idle*);
 - b. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
 - c. BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 - d. BMN yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. pengelolaan BMN berupa Rumah Negara, yang terdiri atas:
 - a. pengalihan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara Golongan II kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - b. pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya.

KETIGA

: Dasar nilai yang digunakan dalam pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN dalam Keputusan Menteri ini adalah nilai perolehan, kecuali untuk kondisi berikut ini:

1. apabila BMN diperoleh dengan tanpa diketahui nilainya, maka nilai yang digunakan adalah sebesar nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh;
2. apabila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, maka nilai yang digunakan adalah nilai berdasarkan hasil penilaian kembali;
3. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan awal suatu BMN yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja maka nilai yang digunakan adalah:
 - a. nilai perolehan ditambah kapitalisasi biaya;
 - b. nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh ditambah kapitalisasi biaya bila BMN diperoleh dengan tanpa nilai; atau
 - c. nilai hasil penilaian kembali ditambah kapitalisasi biaya bila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali berdasarkan ketentuan.

KEEMPAT

: Dikecualikan dari ketentuan batasan nilai kewenangan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yaitu:

1. Dalam hal terdapat permohonan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara, Pengalihan status penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, namun atas BMN tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian dari paket BMN yang diusulkan belum diterbitkan Penetapan status penggunaannya, maka dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada Pemohon,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

penerbitan keputusan penetapan status penggunaan atas BMN tersebut dilakukan oleh Pejabat yang menerima permohonan dimaksud.

2. Dalam hal terdapat permohonan pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan atau tukar menukar, berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per usulan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per usulan;

maka permohonan pemindahtanganan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah masing-masing (apabila penerusan dari Kepala KPKNL) untuk diajukan persetujuannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

KELIMA : Dalam hal terdapat Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani dan/atau ditetapkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka Pejabat yang semestinya memiliki kewenangan tersebut menetapkan kembali Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut dan menginformasikan kepada Pemohon.

KEENAM : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dalam hal Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memperoleh pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Pejabat dimaksud melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETUJUH : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pejabat yang ditunjuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan kepala surat dinas/keputusan dan penomoran surat dinas/keputusan yang ditandatangani pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama (a.n.) Menteri Keuangan berpedoman



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata naskah dinas dan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan serta tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

2. Penggunaan cap dinas yang digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diberi wewenang menandatangani naskah dinas atas nama (a.n.) Menteri Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata naskah dinas dan cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

1. surat dan/atau keputusan persetujuan/penolakan atas usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang telah ditetapkan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tetap berlaku;
2. pelaksanaan pemberian persetujuan/penolakan atas usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang telah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, proses penyelesaiannya berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Partolo

NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA PEJABAT DI KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
A.	<p>KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)</p> <p>1. Persetujuan/penolakan usulan penggunaan BMN, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penetapan status penggunaan BMN, berupa:<ul style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).b. Pengalihan status penggunaan BMN, berupa:<ul style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).c. Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:<ul style="list-style-type: none">1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).d. Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

fungsi Kementerian/Lembaga, berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN *) dan perpanjangannya, dalam bentuk:

a. Sewa untuk BMN berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*) Dalam hal bangunan yang akan dimanfaatkan dengan cara Sewa, Pinjam Pakai, atau Kerja Sama Pemanfaatan berupa gedung bertingkat, maka perlu adanya penghitungan proporsionalitas luas tanah dan bangunan, contoh:

Pemanfaatan dilakukan terhadap sebagian bangunan bertingkat seluas 10m² luas bangunan (misal untuk ATM). Luas tapak tanah bangunan bertingkat 100m² (yang merupakan bagian dari luas tanah seluas 700m²) dan luas seluruh bangunan 500m² (5 tingkat). Luas proporsional atas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

tanah dan bangunan dihitung sebagai berikut:

- Luas proporsional tanah:
 - Luas proporsional tanah = (luas bangunan yang akan dimanfaatkan/luas seluruh bangunan) x luas tapak tanah
= $(10/500) \times 100 = 2\text{m}^2$
 - Nilai tanah = $2\text{m}^2 \times \text{Nilai Perolehan per meter persegi}$
- Luas proporsional bangunan:
 - Luas proporsional bangunan = luas bangunan yang akan dimanfaatkan
= 10m^2
 - Nilai tanah = $10\text{m}^2 \times \text{Nilai Perolehan per meter persegi}$

- d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
3. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan cara:
- a. Penjualan untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Hibah untuk BMN berupa:
- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
 - e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
 - f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
 - g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.
- berupa:
- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, dengan cara:
- a. penjualan dan tukar menukar, berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 5 -

	<p>dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>b. hibah, berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>6. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN yang berada di luar negeri, berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
B.	KEWENANGAN PENGELOLAAN ASET KREDIT <p>1. Melimpahkan penanganan perkara atas aset-aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Eks. BPPN) dan eks. Bank Dalam Likuidasi (Eks. BDL) yang terkait dengan permasalahan hukum kepada unit internal Kementerian Keuangan yang bertugas dalam penanganan permasalahan hukum.</p> <p>2. Menyerahkan pengurusan Aset kredit eks. BPPN dan eks. BDL ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan selanjutnya bertindak selaku Penyerah Putang.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Direktorat Jenderal DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd


Partolo

SONNY LOHO

NIP 19680323 198803 1 004

DISTRIBUSI II



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
A.	<p>KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)</p> <p>1. Persetujuan/penolakan usulan penggunaan BMN, dalam bentuk:</p> <p>a. Penetapan status penggunaan BMN, berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>b. Pengalihan status penggunaan BMN, berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>c. Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>2. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN *) dan perpanjangannya, dalam bentuk:</p> <p>a. Sewa untuk BMN berupa:</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*) Dalam hal bangunan yang akan dimanfaatkan dengan cara Sewa, Pinjam Pakai, atau Kerja Sama Pemanfaatan berupa gedung bertingkat, maka perlu adanya penghitungan proporsionalitas luas tanah dan bangunan, contoh:

Pemanfaatan dilakukan terhadap sebagian bangunan bertingkat seluas 10m² luas bangunan (misal untuk ATM). Luas tapak tanah bangunan bertingkat 100m² (yang merupakan bagian dari luas tanah seluas 700m²) dan luas seluruh bangunan 500m² (5 tingkat). Luas proporsional atas tanah dan bangunan dihitung sebagai berikut:

• Luas proporsional tanah:

- Luas proporsional tanah = (luas bangunan yang akan dimanfaatkan/luas seluruh bangunan) x luas tapak tanah

$$= (10/500) \times 100 = 2\text{m}^2$$

- Nilai tanah = 2m² x Nilai Perolehan per



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

meter persegi

- Luas proporsional bangunan:
 - Luas proporsional bangunan = luas bangunan yang akan dimanfaatkan
= 10m^2
 - Nilai tanah = $10\text{m}^2 \times$ Nilai Perolehan per meter persegi
3. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan cara Penjualan atau Tukar Menukar, berupa:
- a. Penjualan untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - c. Hibah untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
4. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum,



Partolo
NIP. 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
KEUANGAN YANG TELAH DILIMPALKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPALKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA YANG DITERUSLIMPALKAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
A.	KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1. Persetujuan/penolakan usulan penggunaan BMN, dalam bentuk: a. Penetapan status penggunaan BMN, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). b. Pengalihan status penggunaan BMN, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). c. Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN *) dan perpanjangannya, dalam bentuk:
- a. Sewa untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- *) Dalam hal bangunan yang akan dimanfaatkan dengan cara Sewa, Pinjam Pakai, atau Kerja Sama Pemanfaatan berupa gedung bertingkat, maka perlu adanya penghitungan proporsionalitas luas tanah dan bangunan, contoh:
- Pemanfaatan dilakukan terhadap sebagian bangunan bertingkat seluas 10m² luas bangunan (misal untuk ATM). Luas tapak tanah bangunan bertingkat 100m² (yang merupakan bagian dari luas tanah seluas 700m²) dan luas seluruh bangunan 500m² (5 tingkat). Luas proporsional atas tanah dan bangunan dihitung sebagai berikut:
- Luas proporsional tanah:
 - Luas proporsional tanah = (luas bangunan yang akan dimanfaatkan/luas seluruh bangunan) x luas tapak tanah
= (10/500) x 100 = 2m²
 - Nilai tanah = 2m² x Nilai Perolehan per meter persegi
 - Luas proporsional bangunan:
 - Luas proporsional bangunan = luas bangunan yang akan dimanfaatkan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Nilai tanah = $10m^2$
= $10m^2 \times$ Nilai Perolehan per meter persegi

3. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan cara:
- a. Penjualan untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Tukar Menukar untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - c. Hibah untuk BMN berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
- a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
 - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- i. termasuk sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

SONNY LOHO

u.b.
Kepala Bagian Umum,


Partolo
NIP 19680323198803 1 004

DISTRIBUSI II